

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Kajian mengenai sistem perpolitikan secara Islami menjadi pilihan penulis. Penulis beralasan, bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam arti hanya menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya saja (mu'amalah ma'a Allah SWT), tetapi merupakan suatu sistem ajaran keagamaan yang lengkap yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia termasuk juga kehidupan berpolitik dan bernegara. Berdasarkan sejarah, Islam sejak masa awalnya sudah mengalami masa kejayaan dibidang politik dan keagamaan, yaitu sejak zaman Nabi Muhammad Saw memimpin, masa-masa jauh sebelum beliau wafat. Berkaitan dengan masa kesuksesan politik itu, maka ekspansi militer serta dakwah kaum musliminpun mengalami kejayaan yang memuaskan, yaitu di bawah pimpinan para sahabat Nabi.

Namun ironisnya, umat Islam setelah masa kepemimpinan Rasulullah SAW dan para sahabatnya banyak yang belum bahkan tidak ingin mengetahui serta menyadari tentang hal tersebut. Sebagaimana masalah yang terus berkembang hingga saat ini, yaitu bahwa sejak dulu banyak tokoh-tokoh Islam sendiri yang sengaja melontarkan kekhawatiran serius tentang isu politisasi agama atau agama berpolitik. Oleh karena itu secara otomatis, walaupun kadang tidak secara langsung hal ini telah menanamkan ketakutan dihati sebagian orang Islam untuk

.....

pernyataan bahwa agama Islam tidak mempunyai kaitan hal apapun dengan politik. Menurut mereka Islam hanyalah bertujuan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat saja.

Padahal sesungguhnya, ketakutan orang Islam akan segala hal yang berbau politik dan berbicara mengenai hubungan Islam dan politik itu adalah merupakan imbas dari racun pemikiran yang memang sengaja ditanamkan oleh para penjajah dan orientalis untuk mempertahankan kekuasaannya. Mereka berusaha keras menanamkan keyakinan dihati dan pikiran setiap umat Islam, bahwa Islam adalah agama tanpa negara. Adapun urusan negara sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Agama adalah soal ibadah semata. Sedangkan negara adalah soal lainnya. Intinya, politik dan negara hanyalah urusan rekayasa akal manusia, dan merupakan suatu hal yang ditabukan. Tak heran bila akhirnya rezim penguasa yang teramat zalim sekalipun dapat bertahan aman dan nyaman dengan melakukan segala bentuk kejahatan-kejahatan politiknya secara leluasa dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Dalam hal ini pula terjadi suatu perkembangan paralel terhadap sistem agama, yakni pemindahan bertahap kekuasaan keagamaan dari elite kepemimpinan agama kepada orang awam. Kaum awam ini memikul peranan penting yang terus meluas sebagai pemimpin-pemimpin keagamaan dan penafsir-penafsir doktrin agama, yaitu diwarnai dengan kebangkitan para elite intelektual baru yang berpendidikan barat yang menggempal elite keagamaan tradisional

sebagai tidak mampu melakukan penyesuaian yang dibutuhkan dalam dunia modern.<sup>1</sup>

Hal ini pula yang akhirnya juga mengesampingkan para elite agama tradisional dalam artian elite agama yang sesungguhnya, yang memahami tentang agama secara menyeluruh.

Islam melalui pedoman Al-qur'an dan Al-hadistnya selalu membimbing serta mengajarkan kepada umatnya untuk hidup didalam keteraturan serta kedamaian. Islam sama sekali tidak mengajarkan kepada umatnya suatu sistem kehidupan yang tidak beraturan dan tidak berasaskan norma-norma serta etika keagamaan. Islam mengajarkan kebersamaan dan kesetaraan diantara umatnya, bahkan dalam hal ibadah pun Islam memerintahkan kita untuk menyamakan *shaf* didalam shalat. Al-qur'an yang merupakan kitab sucinya berfungsi sebagai miniatur alam raya yang memuat segala disiplin ilmu pengetahuan, serta merupakan sarana penyelesaian segala permasalahan sepanjang hidup manusia.

Islam melalui Al-qu'an pun selalu menganjurkan umatnya untuk mengutamakan ilmu sebagai pegangan hidup, hal ini sebagaimana terbukti dari ayat yang paling pertama diturunkan oleh Allah SWT melalui malaikat jibril kepada Rasulullah yang berbunyi "Iqra" yang artinya "bacalah". Disiplin Ilmu sangatlah diperlukan didalam Islam, Allah SWT sendiri sebagai pencipta makhluk juga banyak memberikan perintah maupun sindiran-sindiran kepada makhluknya melalui ayat-ayatnya, yang intinya adalah agar umat Islam mau dan memiliki *ghiroh* untuk memahami serta mempelajari alam raya yang telah diciptakan-Nya.

Selain Al-qur'an, Islam pun membimbing umatnya melalui As-Sunnah/Al-Hadist, yaitu mengenai kehidupan serta akhlak dan moral umat Islam dizaman Rasulullah SAW yang merupakan sebuah panutan didalam kehidupan bermasyarakat termasuk kehidupan bernegara. Semenjak zaman pemerintahan Rasulullah SAW, kegiatan politik dan kenegaraan pun telah diterapkan. Rasulullah SAW sendiri dimasa kepemimpinannya selalu menerapkan kebijakan-kebijakan politik yang sesuai dengan koridor-koridor keagamaan sehingga bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia.

Sedangkan yang berkaitan dengan ilmu, Rasulullah SAW sendiri menggalang generasi muda yaitu para sahabatnya agar mau untuk menuntut ilmu. Sebagaiman diketahui bahwa pada awal masa kepemimpinan Rasulullah SAW jumlah kaum muslimin yang dapat membaca dan menulis sangatlah kecil, oleh karenanya Rasulullah SAW memberlakukan suatu kebijakan, bahwa tawanan perang yang pandai membaca dan menulis diberi kesempatan untuk menebus dirinya dengan cara mengajar di "madrasah" dekat masjid Nabawi yang dikenal dengan *Shuffah*. Dan bukan hanya itu, kebijakan beliau yang lain dalam rangka mengembangkan ilmu kepada umatnya adalah bahwa orang yang berkecukupan harta dihimbau agar menyisihkan sebagian rizkinya untuk menghidupi *ahlus-shuffah* yang akan dan sedang tekun belajar. Mungkin istilah zaman sekarang terhadap kebijakan tersebut adalah pemberian bea siswa. Dari peristiwa ini, maka dapat terbukti pula bahwa Rasulullah SAW dizamannya pun telah melihat kedepan, bahwa pendidikanlah yang akan mencerahkan umatnya kelak. Maka

investasi melalui pendidikan, yang mana hal ini tidak dilakukan oleh penguasa-penguasa dizaman sebelum Beliau.

Kaitannya terhadap politik, politik sendiri merupakan bagian dari Ilmu pengetahuan. Politik mencakup kebijaksanaan/ tindakan yang bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan/pemerintahan termasuk yang menyangkut penetapan bentuk, tugas dan lingkup urusan negara.<sup>2</sup> Ketatanegaraan tersebut berupa suatu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak yang berkuasa dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan stabilitas negara yang bersangkutan. Jika kita membicarakan politik dalam konteks agama, berarti juga kita membicarakan suatu bentuk kekuasaan yang berubah menjadi suatu kebijakan yang akhirnya akan menjurus kepada suatu sikap adil dan bijaksana.

Salah satu konsep baku yang ada dalam konsep berpolitik menurut Islam yaitu 'keadilan'. Keadilan itu mutlak diperlukan, kendati dalam prakteknya berupa suatu kenyataan bahwa yang kita hadapi adalah sanak saudara kita sendiri. Allah SWT melarang manusia terutama politikus kenegaraan dan pejabat pemerintahan dalam memanipulasi fakta. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

*"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar - benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah SWT biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah SWT lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (An-Nisa':135)"*

---

<sup>2</sup> Marbun; *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan) hal. 144.

pada khususnya mudah terjebak, yang mana hal ini tidak lain disebabkan oleh banyaknya pertimbangan mengenai masalah keduniaan diantaranya juga mengenai politik praktis. Salah satu fenomena menarik dan memprihatinkan yang sering kita temui didalam praktek kehidupan berpolitik, yaitu yang khususnya lazim kita temui pada setiap penyelenggaraan pemilu dinegara kita adalah masalah politisasi agama. Sebagai contoh kasus dinegara kita yaitu mengenai masalah teraktual tentang fatwa haram presiden perempuan yang dilontarkan oleh sekelompok kiai sepuh NU di Pasuruan, Jawa Timur. Dan fatwa yang sama dikeluarkan para ulama pada penyelenggaraan pemilu 1999, yang kedua hal itu memiliki tujuan yang tidak lain adalah guna menghambat langkah Megawati Soekarno Putri didalam pencalonan dirinya untuk menuju kursi kepresidenan.

Kemudian ketika kasus Megawati yang bersembahyang di Pura, kalau pengertian politisasi agama adalah memanfaatkan agama untuk mencapai tujuan politik, maka aktivitas Mega yang kala itu bersembahyang di Pura adalah politisasi agama. Sebagai bukan Hindu, dan dalam rangka menarik simpati masyarakat Hindu Bali, aktivitas itu jelas bertujuan politis, yaitu agar komunitas Hindu mau memilih partai yang dipimpinnya pada musim Pemilu saat itu.

jika kita menengok ke negara lain, para ulama Al-Azhar, masjid kampus berusia 1000 tahun di Kairo misalnya, kampus itu telah lama menikmati status sebagai suatu hirarki kepemimpinan resmi keagamaan Islam, dan pada awal abad 19 M telah menjadi suatu pusat terbesar kekuatan politik. Namun otonomi dan

bahkan lembaga itu sekarang dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah.<sup>3</sup> Didalam suatu undang-undang di Mesir ketika itu, disebutkan bahwa "Rektor Al-Azhar dinyatakan sebagai "Imam Besar", pemegang kata akhir dalam setiap persoalan yang berhubungan dalam masalah-masalah keagamaan..."<sup>4</sup> Maka, dari sinilah kemudian muncul persepsi-persepsi yang beragam mengenai fungsi dari agama itu sendiri. Timbul sebagian persepsi yang menganggap bahwa agama bisa menimbulkan solidaritas sosial dan menciptakan integrasi bangsa. Begitu juga mengenai kehidupan berpolitik dan bernegara, agama dianggap dapat berperan sebagai alat pemersatu dari sekian banyak etnis yang beragam. Namun jika kita melihat kepada realitas kehidupan politik yang ada dizaman sekarang ini, bahwa agama acap kali dipolitisasi yang mana pada akhirnya berakibat justru menimbulkan perpecahan, dan juga konflik. Efek dari sistem keberagamaan yang acap kali menimbulkan konflik inilah yang membuat sebagian besar orang malah menyangsikan fungsi dari agama itu sendiri, dan hal ini pulalah yang menyebabkan agama menjadi difungsi.

Begitu juga yang terjadi didalam perjalanan organisasi ICMI. ICMI sebagai organisasi yang berbasis Islam ternyata banyak melakukan manuver-manuver politik yang pada kenyataannya menyimpang dari etika serta moral agama Islam itu sendiri. Banyak tujuan-tujuan serta rencana kegiatan yang positif didalam pencetusan pembentukan ICMI ini pada awalnya, namun pada realitas yang ada

---

<sup>3</sup> Donal Eugene Smith; *Agama Ditengah Sekulerisasi Politik* ( Jakarta; Pustaka Panjimas, 1985) hal. 128.

<sup>4</sup> Undang-undang 103 tahun 1961 ayat 9, dikutip dalam Daniel Crecelius, "Al Azhar in The Revolution", middle east journal, vol 20 (Winter 1966) hal. 45.

setelah itu, dapat dikatakan bahwa organisasi ini telah gagal didalam menerapkan serta mencapai tujuan yang telah I di cita-cita kan oleh para pencetusnya.

ICMI lebih cenderung bergerak didalam suatu kegiatan yang meorientasikan kepada sesuatu yang berbau politik dan kekuasaan. Nilai-nilai kemurnian dari sepak terjang ICMI pun lambat laun hilang dan berganti dengan ketamakan-ketamakan para anggotanya terhadap kekuasaan.

Oleh karena itu kiranya perlu diadakannya suatu pembelajaran kembali kepada masyarakat serta khalayak luas mengenai fungsi dari pada agama itu sendiri, serta melihat kembali dan mempraktekkan mengenai adanya korelasi serta ketergantungan antara politik dan Islam, dengan harapan agar kegiatan politik tidak lagi hanya dipolitisasi oleh segolongan manusia saja dan merugikan masyarakat luas. Namun yang lebih ironisnya lagi, ketakutan berpolitik yang dirasakan oleh sebagian umat Islam ini semakin tumbuh subur disetiap belahan negara, terutama negara yang berpenduduk mayoritas Islam, dan yang telah menjadi bekas jajahan kolonial Eropa. Dalam hal ini pula siasat jahat para orientalis sekuler telah berhasil hinggap dihati sebagian umat Islam saat ini. Jika kita mau melihat secara lebih dalam lagi maka hal-hal diatas semakin terlihat melalui beberapa indikasi, diantara salah satunya yaitu: selama ini hampir disetiap tempat pengajian-pengajian dikalangan umat Islam pada umumnya hanya berisi soal akhirat, surga, dan neraka saja. Sedangkan pengajian untuk menegakkan keadilan, membangkitkan kesadaran membela kebenaran, melawan penindasan dan kesewenang-wenangan menentang rezim korup sebagai pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* tidak mendapat porsi yang memuaskan,

dipolitisasi dengan tujuan untuk mengapai tujuan-tujuan pribadi dengan tidak memikirkan kemaslahatan umat. Mereka yang mengaku mengerti tentang agama justru hanya menggunakan isu agama untuk hal-hal tertentu saja. Bahkan cenderung didalam kegiatan hidup sehari-harinya sangat jauh dari nilai-nilai keIslaman.

#### **D. Pokok Permasalahan**

Dari pembahasan permasalahan tersebut, maka pertanyaan mendasar yang terkait dengan tema yang akan penulis utarakan yaitu: **Mengapa terjadi politisasi agama didalam perjalanan organisasi ICMI di Indonesia?**

#### **E. Kerangka Dasar Pemikiran**

Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan, menurut aturan-aturan logika, dan menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena-fenomena tersebut secara ilmiah.<sup>5</sup>

Sedangkan konsep adalah suatu bentuk definisi yang bersifat abstrak yang menggambarkan sebuah fenomena dengan menggunakan konsep-konsep lainnya.

Politisasi agama merupakan masalah serius yang telah merebak serta meresahkan didalam kancah percaturan politik di Indonesia. Tujuan dari tindakan politisasi suatu ajaran agama didalam kehidupan bernegara dapat terjadi karena disebabkan oleh banyak hal dan bersifat kompleks yang mana pada tujuan

intinya adalah berorientasi terhadap perolehan tampuk kekuasaan dan legitimasi publik.

Fenomena nyata di Indonesia yang pernah terjadi seperti yang sedikit telah dsinggung diatas, yaitu mengenai organisasi ICMI. ICMI merupakan suatu wadah organisasi Islam yang pada awal pendiriannya mempunyai tujuan haqiqi diantaranya meningkatkan kualitas hidup, kualitas bekerja dan berkarya, serta kualitas berfikir seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. ICMI juga bukanlah suatu organisasi politik. Dan juga kegiatan haqiqi dari organisasi ini bukanlah mengejar tujuan-tujuan praktis, dan merupakan suatu organisasi yang tidak terikat dengan suatu kelas sosial manapun.

Banyak pula individu-individu yang melihat serta mengaggap bahwa ICMI merupakan sebuah solusi excellent bagi umat Islam Indonesia demi menjembatani jurang antara kaum muslim dengan para pemimpin. Hal ini disebabkan pada masa orde baru dianggap "menganak tirikan" terhadap komunitas Islam.

Namun pada realita serta kejadian yang ada, bahwa ICMI yang dilihat sebagai bentuk Organisasi, ternyata hanya dimanfaatkan oleh pemerintah diantaranya untuk mengukuhkan rezim Soeharto. Dan secara '*opportunitif*' beberapa orang juga menggunakan serata memanfaatkan ICMI sebagai '*kendaraan politis*'. Sehingga tidak mengherankan didalam sistematika keanggotannya banyak didapati orang-orang yang sama sekali tidak terkait ataupun tidak relevan dengan agenda dari ICMI itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional* (Pusat Antar UGM, YOGYA, 1998) hal. 186.

Jika mengenai kekuasaan dan hegemoni Gramsci berpendapat, “Hegemoni muncul ketika negara secara ideo-politis mendominasi masyarakat dan kekuatan sosial politik lainnya.”<sup>9</sup>

Menurutnya, agar yang dikuasai mematuhi penguasa, yang dikuasai tidak hanya harus merasa mempunyai dan menginternalisasi nilai-nilai serta norma penguasa. Lebih dari itu, mereka juga harus memberi persetujuan atas subordinasi mereka.<sup>10</sup>

Teori selanjutnya yaitu teori korporasi, Teori ini dibawakan oleh Schmitter, Ia mengatakan: “Suatu system perwakilan kepentingan di mana unit-unit yang membentuknya diatur dalam organisasi- organisasi yang jumlahnya terbatas dan bersifat tunggal, mewajibkan keanggotaan, tidak saling bersaing, ditata secara hirarkis dan dibedakan menurut fungsinya; yang diakui atau diizinkan oleh negara dan diberi hak monopoli untuk mewakili kepentingan dalam bidangnya masing-masing sebagai imbalan atas kesediaannya mematuhi pengendalian pemerintah dalam hal pemilihan pemimpin dan dalam artikulasi tuntutan dan dukungan.” (Schmitter 1974:93-94)<sup>11</sup>

Tujuan penerapan system seperti itu adalah untuk meredam konflik antar kelas dan antar kelompok dan demi menciptakan keselarasan, keharmonisan dan kerja sama dalam hubungan antara negara dan masyarakat.

<sup>9</sup> Richard Bellamy, *Teori Sosial Modern, Perspektif Itali*, terj. Vedi R. Hadiz (Jakarta: LP3ES, 1990) hal. 184-185.

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Schmitter, P. (1974). "The Semi-Democratic Regime" (Duta, Jakarta, 2002) hal.

konsep selanjutnya yang dianggap tepat untuk menjabarkan mengenai aksi politisasi agama didalam ICMI yaitu, Konsep Imam yang sering dijuluki hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali, yaitu tentang Ulama As-Syu', Beliau mengatakan bahwa ada dua kategori ulama. Yang pertama disebut ulama As-Syuk, yaitu ulama jahat yang telah mensubordinasikan kepentingan agama di bawah kepentingan keduniaan dan manifestasi dari pekerjaan ulama al-syuk itu adalah selalu menjual ayat dengan murah, dan mencarikan justifikasi atau rasionalisasi atau pembenaran murahan dengan mengambil dalil-dalil agama maupun logika tertentu, agar tujuan politik penguasa dapat dicapai walaupun dengan risiko pembodohan masyarakat.<sup>12</sup>

Cendikiawan yang memegang kekuasaan, secara tepat digambarkan oleh Imam al-Ghazali haruslah sebagai berikut: *“Agama dan kekuasaan adalah dua saudara kembar. Agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan hilang dan lenyap”*.<sup>13</sup>

kehancuran suatu bangsa, disebabkan karena penguasa selalu melecehkan agama. Agama hanya dijadikan sebagai kedok. Agama sebagai asas moral tidak dijadikan tolok ukur pembangunan bangsa, yang akhirnya ketimpangan moral dalam seluruh segmen kehidupan bangsa tidak bisa dibendung lagi, sehingga bermuara pada sentralisme dan monopoli kekuasaan.

Sungguh memprihatinkan bahwa agama selama ini dipakai sebagai *stempel* dan *kuda lumping*. Stempel artinya, menjadi alat legitimasi kekuasaan dan kuda

---

<sup>12</sup> G. L. W. ...

lumping berarti agama dijadikan alat untuk "memakan" apa saja yang tidak dikehendaki penguasa.<sup>14</sup> Dengan demikian agama telah dipolitisasi. Didalam sebuah negara ada dua kekuatan besar, yaitu agama dan politik, yang untuk keduanya banyak orang bersedia mati. Ironisnya bahwa, mungkin tidak ada konflik yang lebih kejam daripada konflik yang dipicu oleh sentimen agama.

Sekalipun agama mengajarkan yang baik, perilaku manusia lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain agama. Bisa kita saksikan apa yang terjadi saat ini dinegara kita, ketika nuansa korupsi dan kolusi makin terbuka dan berani dari pusat hingga daerah, merupakan titik balik dari keberadaan agama dalam fenomena politik kenegaraan kita. Sementara itu, beratus-ratus ayat disampaikan selama kampanye berlangsung untuk mengutuk, menghardik, dan melegitimasi serangan tajam antar juru kampanye tentang keadaan yang ada, realitasnya keadaan belum beranjak jauh dari apa yang mereka janjikan selama kampanye. Akankah hal demikian terus terulang dinegeri ini? Jadi, Indonesia bisa menjadi seperti ini, bukan karena motivasi agama. Sebab, jauh lebih banyak faktor-faktor lain yang lebih efektif pengaruhnya daripada agama.

Politisasi agama juga dapat dinetralisir melalui konsep rasionalisasi agama yaitu dengan penghilangan fanatisme buta melalui gerakan modernisasi agama yang oleh Cak Nur sering disebut upaya rasionalisasi agama.

Robert N. Bellah dalam *Beyond Belief* (1970) mengidealkan negara sekuler sebagai manifestasi tertinggi rasionalitas agama; a perfectly reasonable

---

<sup>13</sup> Paramadina; *Jurnal Pemikiran Islam* (Volume 1, nomor 2, 1999) hal. 56

Hipotesa adalah proposisi yang memiliki dukungan teoritis tetapi tidak didukung fakta yang empiris. Dengan kata lain, hipotesa merupakan kesimpulan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya.<sup>17</sup>

Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka hipotesis mengenai upaya mengurangi serta solusi terhadap praktek politisasi agama adalah:

Praktek politisasi Islam didalam organisasi ICMI, terjadi karena lemahnya system kesadaran kritis para elite ICMI, menguatnya pengaruh Negara terhadap ICMI, serta system rekrutmen yang lemah terhadap keanggotaan ICMI.

## **G. Jangkauan penelitian**

Ruang lingkup suatu jangkauan penelitian terhadap suatu masalah sangat diperlukan agar memperjelas hal-hal pokok dalam melihat masalah yang sebenarnya. Untuk membuat terarahnya pembahasan atau penelitian terhadap skripsi yang berjudul:

### **Studi mengenai Praktek Politisasi Di Dalam Tubuh ICMI.**

Maka penulis membatasi penulisan ini hanya mengenai pembahasan terhadap fenomena politisasi agama serta aktivitas politik yang terjadi didalam tubuh ICMI di Indonesia dimasa orde baru.

## **H. Metode Penelitian**

---

<sup>17</sup> ... .. ICMI (1998) hal. 170

Untuk melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan sistem library research atau studi kepustakaan yang mana bersumber dari literatur-literatur, buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah dan sumber lain yang mendukung dan relevan sebagai penelitian ini.

### **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang penulis bahas, penulis menggunakan sistematika penulisan dalam beberapa bab sebagaimana penulis uraikan dibawah ini:

## **-BAB I PENDAHULUAN**

**A. Alasan Pemilihan judul**

**B. Tujuan Penelitian**

**C. Latar Belakang Masalah**

**D. Pokok Permasalahan**

**E. Kerangka Dasar Pemikiran**

**F. Hipotesis**

**G. Jangkauan Penelitian**

**H. Metode Penelitian**

**I. Sistematika Penulisan**

**-BAB II ISLAM:POLITIK DAN KEKUASAAN**

- A. Pengertian Politik Islam**
- B. Prinsip-Prinsip Politik Islam**
- C. Kekuasaan Menurut Pandangan Islam**
- D. Sistem Pemerintahan Di dalam Al-qur'an dan As-Sunnah**
- E. Fakta Relasi Islam dan Politik di Dunia Islam**

**-BAB III ICMI DAN POLITISASI ISLAM DI INDONESIA**

- A. Sejarah Berdirinya ICMI**
- B. Orientasi Peranan ICMI di Indonesia**
- C. Penyimpangan-penyimpangan Etika Organisasi didalam ICMI**

**-BAB IV SEBAB-SEBAB POLITISASI AGAMA OLEH ICMI**

- A. Lemahnya kesadaran kritis elite ICMI**
- B. Menguatnya pengaruh negara terhadap ICMI**
- C. Sistem Rekrutmen Yang Lemah**

**-BAB V KESIMPULAN**